



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 129 TAHUN 2023  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut *Road Map* RB Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Road Map* RB Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023-2024.

KETIGA : *Road Map* RB Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023-2024.

KEEMPAT : Hasil penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Pada Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



S AN US I  
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 129 TAHUN 2023  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA 2020-2024

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta memberikan pelayanan publik prima di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkomitmen melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks RB Kemenpora yang memiliki grafik meningkat setiap tahunnya.

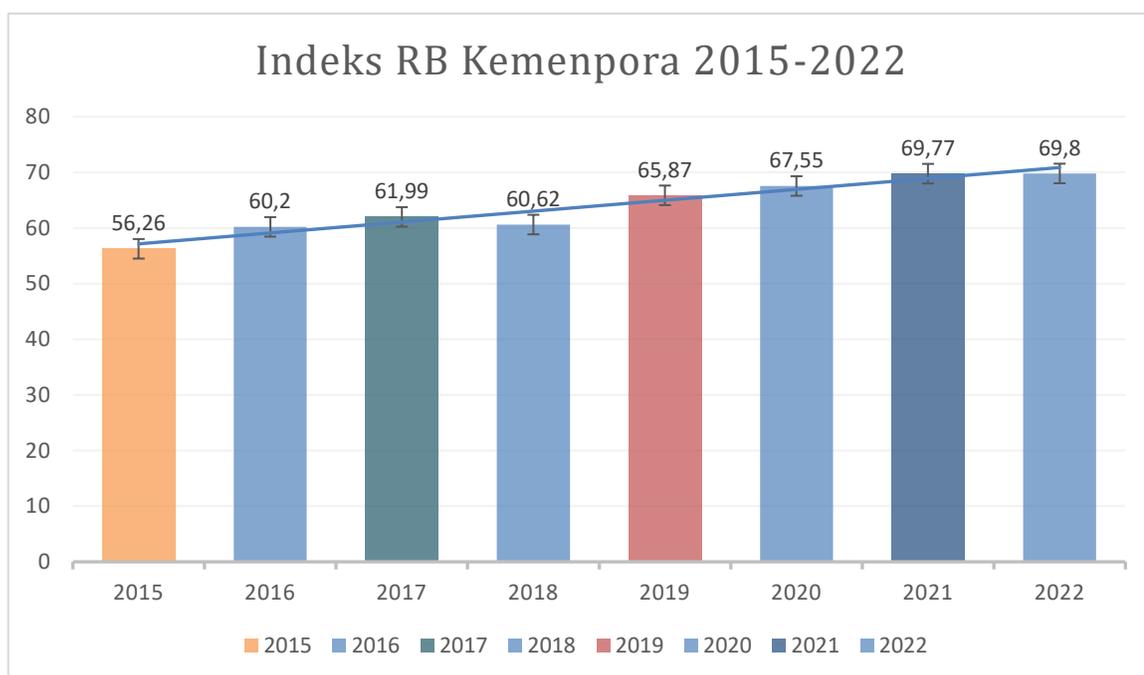
Tujuan RB Kemenpora berdasarkan Sasaran Strategis yaitu terwujudnya tata kelola kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional dan melayani. Hal ini juga berlaku pada prioritas RB Kemenpora yang sesuai dengan sasaran RB Nasional yaitu perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

RB General Kemenpora menerapkan seluruh kegiatan utama secara mandatory. Namun demikian, terdapat prioritas kegiatan utama RB General yang dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan. Selanjutnya, Kemenpora menetapkan 2 (dua) tema dalam penerapan RB Tematik yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat yang meliputi Penurunan Angka Kemiskinan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

B. LATAR BELAKANG

RB Kemenpora merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan yang menyebabkan tuntutan masyarakat semakin tinggi. Tujuan tata kelola Kemenpora melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya target kinerja yang ditetapkan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain RB merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenpora berkomitmen melakukan peningkatan kualitas RB secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks RB Kemenpora yang terus meningkat sejak tahun 2015.

Grafik 1. Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2022



Adapun capaian RB Kemenpora Tahun 2016-2022 berdasarkan nilai masing-masing area perubahan sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian indeks RB tahun 2016-2022 per area perubahan

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian MenPANRB						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Komponen Pengungkit</b>									
1	Manajemen Perubahan	5.00	3,00	3,16	2,04	2,10	1,78	-	-
2	Deregulasi Kebijakan	5.00	2,71	3,34	3,34	3,36	1,9	-	-
3	Penguatan Organisasi	6.00	4,01	4,01	4,04	4,09	2,13	-	-
4	Penataan Tata Laksana	5.00	3,04	3,47	3,11	3,20	1,85	-	-
5	Manajemen SDM	15.00	12,33	12,25	12,27	12,35	2,79	-	-
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	1,67	1,87	1,92	2,42	2,08	-	-
7	Penguatan Pengawasan	12.00	5,33	4,99	3,18	3,21	2,03	-	-
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6.00	1,67	1,87	1,92	2,42	1,9	-	-

	Sub Total Komponen Pengungkit	60.00	35,24	36,47	33,21	34,08	36,61	37,69	38,67
B. <i>Komponen Pengungkit</i>									
1	Kapasitas dan Akuntabilitas	20.00	11,91	11,16	12,15	13,70	7,63	7,73	7,69
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	6,32	7,00	7,27	9,37	9,25	7,82	7,88
3	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	6,73	7,36	8,00	8,73	8,95	8,99	9,52
4	Kinerja Organisasi	-	-	-	-	-	5,11	7,54	6,04
	Sub Total Komponen Hasil	40.00	24,96	25,52	27,41	31,79	30,94	32,08	31,13
	Total Indeks Reformasi Birokrasi	100.00	60,2	61,99	60,62	65,87	67,55	69,77	69,80

Penerapan RB Kemenpora dilaksanakan sesuai dengan *Road Map* RB Kemenpora Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021. Namun demikian, terdapat perkembangan kebijakan mengenai RB dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mana pada Pasal 3A menjelaskan bahwa kementerian/lembaga perlu menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Kemenpora perlu melakukan penyesuaian *Road Map* RB 2020-2024 mengingat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

BAB II  
GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Kemenpora terus berupaya untuk mengimplementasikan RB agar lebih berdampak ke masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks RB Kemenpora Tahun 2022 yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan Indeks sebesar 69.80 dalam kategori “B” atau predikat "Baik". Kondisi eksisting Kemenpora Tahun 2022 jika disandingkan dengan Target Renstra Tahun 2024 tersaji dalam tabel Sasaran Strategis dan Sasaran Program RB Kemenpora Tahun 2020-2024 berikut:

SASARAN STRATEGIS RB KEMENPORA TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Skala	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani	Indeks RB	0-100	75.1	69.77	69.80	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra Kementerian
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra satker
	Indeks Pelayanan Publik	1-5	4,51 (A)	3,76 (B)	4,01 (A-)	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra satker
Terwujudnya Pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya, dan berdayasaing	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0-100	57,67	54,59	55,61	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra satker
	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaaan	0-100	81	70	75	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra satker

Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Skala	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga tingkat Asia dan Dunia	Persentase penduduk 10 tahun ketas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	0-100%	40	32,83	30,39	Penurunan pencapaian pada tahun 2022 disebabkan intervensi kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum maksimal
	Peringkat Pada <i>Asian Games</i>	Peringkat	N/A	4 (2018)	8 (2022)	Pelaksanaan <i>Asian Games</i> 2022 dilaksanakan pada tahun 2023
	Peringkat Pada <i>Asian Para Games</i>	Peringkat	N/A	5 (2018)	8 (2022)	Pelaksanaan <i>Asian Para Games</i> 2022 dilaksanakan pada tahun 2023
	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olimpiade	- (medali emas)	3	1	N/A	Medali yang diperoleh Indonesia dalam multievent Olimpiade pada Tahun 2021 dan 2024
	Jumlah Perolehan medali emas Paralimpiade	- (medali emas)	3	2	N/A	Medali yang diperoleh Indonesia dalam multievent Paralimpiade pada Tahun 2021 dan 2024

Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Skala	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
	Tingkat Kebugaran jasmani masyarakat	60% (Target DBON Tahun 2045)	30% (Target DBON tahun 2024)	26,35 %	26,58%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2022 terdapat perubahan Formula Perhitungan</li> <li>• Mengacu target DBON Tahun 2024</li> </ul>
	Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat Internasional	0-100%	60%	N/A	N/A	Terdapat indikator baru, menyesuaikan perubahan nomenklatur dan mengakomodir indikator smart
	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	0-100%	82%	N/A	N/A	Terdapat indikator baru, menyesuaikan perubahan nomenklatur dan mengakomodir indikator smart

SASARAN PROGRAM RB KEMENPORA TAHUN 2020-2024

Sasaran Program RB 2020-2024	Indikator Sasaran Program	Skala	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani	Nilai SAKIP	0-100	75	67,57	67,93	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Tingkat Harmonisasi dan Pengendalian Produk Hukum	0-100%	82	80	65	Target disesuaikan dengan realisasi kondisi eksisting
	Indeks Sistem Merit	0-400	310	269,5	269,5	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Indeks Profesional ASN	0-100	65	40	56,05	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	IKPA Kemenpora	0-100	90	78,98	87,62	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi	0-100	3	2,716	2,947	Target disesuaikan dengan realisasi kondisi eksisting
	Tingkat Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP	0-100	100	100	100	Target disesuaikan dengan realisasi kondisi eksisting
	Indeks kepuasan masyarakat Kemenpora	0-100	90	89.87	88.24	Terdapat perubahan formula perhitungan pada tahun 2022

Sasaran Program RB 2020-2024	Indikator Sasaran Program	Skala	Target Renstra 2024	Realisasi 2021	Kondisi Eksisting 2022	Keterangan
	Nilai Kinerja Kemenpora	0-100	92	95.31	86.07	Mengalami penurunan disebabkan oleh adanya indikator kinerja yang tidak dapat dihitung
	Persentase Capaian Pelaksanaan RB Kemenpora	0-100%	94	98,12	96,8	Perhitungan berdasarkan target dan realisasi indeks RB Tahunan
	Indeks SPBE	0-5	3.00	2.48	2.48	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Indeks Efektivitas Kelembagaan	0-100	94	86	90,83	Target disesuaikan dengan realisasi kondisi eksisting
	Indeks kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3	2.43	2.57	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	50	13.80	21.5	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	85	82.91	80.68	Penyesuaian target mengacu pada dokumen renstra
	Nilai Survei Penilaian Integritas	0-100	82	71.1	72.53	Target disesuaikan dengan realisasi kondisi eksisting

BAB III  
AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

A. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan RB Kemenpora sesuai dengan tujuan RB Nasional yaitu mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu. Dengan sasaran RB Kemenpora yakni “Terwujudnya Tata Kelola Kinerja Kemenpora yang akuntabel, professional dan melayani”.

B. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Kemenpora menerapkan seluruh Kegiatan Utama RB General secara *mandatory* untuk tahun 2023-2024. Namun demikian, terdapat prioritas Kegiatan Utama RB General yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan. Kegiatan Utama RB General Kemenpora Tahun 2023-2024 tercantum dalam matriks reformasi birokrasi general sebagai berikut:

MATRIKS REFORMASI BIROKRASI GENERAL

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama		Skala Prioritas	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Unit Satuan Kerja		Instansi Penilai
								Koordinator	Pelaksana	
1	Penataan Jabatan Fungsional	1	Tingkat penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	27	N/A	Baik	Baik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Bidang Organisasi	Kementerian PANRB
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	2	Tingkat Implementasi Sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	23	N/A	Baik	Baik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Bidang Organisasi	Kementerian PANRB
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik prima berbasis Digital	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	21	85,5	89	90	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Bidang Tata Laksana	Kementerian PANRB
		4	Indeks Pelayanan Publik	21	3,85	4,26	4,3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Bidang Tata Laksana	Kementerian PANRB
4	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	5	Indeks SPBE Kemenpora	21	3,32	3,4	3,41	Biro Hukum dan Kerjasama	Bidang Data dan Informasi	Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait
5	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Bidang pemuda dan olahraga	6	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	21	Baik	Baik	Baik	Biro Hukum dan Kerjasama	Bidang Data dan Informasi	Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait

		7	Tingkat Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Bidang pemuda dan olahraga	24	N/A (Tahap uji coba)	2,23	N/A (Target 2 tahun sekali)	Biro Hukum dan Kerjasama	Bidang Data dan Informasi	Badan Pusat Statistik
6	Pelaksanaan Arsip Digital	8	Tingkat Digitalisasi Arsip	21	80,68	81	82	Biro Humas dan Umum	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Arsip Nasional Republik Indonesia
7	Penguatan pengelolaan keuangan dan Aset	9	Indeks Pengelolaan Aset	22	2,65	2,75	2,8	Biro Humas dan Umum	Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Keuangan; dan</li> <li>• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</li> </ul>
8	Penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	10	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	22	21,4	30	35	Biro Humas dan Umum	Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Keuangan; dan</li> <li>• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</li> </ul>
9	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	11	Indeks Perencana Pembangunan	24	N/A	Baik	Baik	Biro Perencanaan dan Keuangan	Bidang Perencanaan dan Anggaran	Kementerian PPN/Bappenas
		12	Nilai SAKIP Kemenpora	24	67,03 (B)	73	75	Biro Perencanaan dan Keuangan	Bidang Reformasi Birokrasi	Kementerian PPN/Bappenas
10	Penguatan	13	IKPA	22	85	88	90	Biro	Bidang	Kementerian

	pengelolaan keuangan dan Aset							Perencanaan dan Keuangan	Keuangan	Keuangan RI
11	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	14	Indeks Kualitas Kebijakan	21	N/A	Baik	N/A (Target 2 tahun sekali)	Biro Hukum dan Kerjasama	Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Lembaga Administrasi Negara
12	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	15	Indeks Reformasi Hukum	21	66,35	70	75	Biro Hukum dan Kerjasama	Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Kementerian Hukum dan HAM
13	Penguatan Implementasi Manajemen Talenta ASN	16	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	23	N/A	Baik	Baik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengembangan Karir dan Disiplin Pegawai; dan</li> <li>• Bidang Perencanaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.</li> </ul>	Kementerian PANRB
14	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Kemenpora	17	Tingkat implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	24	N/A	Baik	Baik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengembangan Karir dan Disiplin Pegawai; dan</li> <li>• Bidang Perencanaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.</li> </ul>	Kementerian PANRB

15	Percepatan Implementasi Sistem Merit	18	Indeks Sistem Merit	23	269,5	295	310	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengembangan Karir dan Disiplin Pegawai; dan</li> <li>• Bidang Perencanaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi Aparatur Sipil Negara; dan</li> <li>• Kementerian PANRB.</li> </ul>
16	Pelaksanaan Core Value ASN	19	Indeks BerAKHLAK	23	N/A	Baik	Baik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengembangan Karir dan Disiplin Pegawai; dan</li> <li>• Bidang Perencanaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.</li> </ul>	Lembaga Administrasi Negara
		20	Employer Branding	23	N/A	Baik	Baik	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengembangan Karir dan Disiplin Pegawai; dan</li> <li>• Bidang Perencanaan, Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.</li> </ul>	Lembaga Administrasi Negara

17	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	21	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	23	N/A	Baik	Baik	Inspektorat	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian PANRB; dan</li> <li>• KPK.</li> </ul>
18	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	22	Level Maturitas SPIP terintegrasi	22	2,978	3	3	Inspektorat	Inspektorat	
19	Penguatan upaya pencegahan korupsi	23	Survey Penilaian Integritas	24	72,53	73,4	74	Inspektorat	Inspektorat	
20	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	24	Persentase tindak Lanjut pengaduan masyarakat	21	88	90	92	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat; dan</li> <li>• Bidang Kehumasan.</li> </ul>	Kementerian PANRB
22	Penguatan pengelolaan keuangan dan Aset	25	Opini BPK	22	WTP	WTP	WTP	Inspektorat	Inspektorat	Kementerian Keuangan
		26	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	22	77,41	70	78	Inspektorat	Inspektorat	

C. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Kemenpora menetapkan 2 (dua) tema dalam penerapan RB Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat. Rincian pelaksanaan RB Tematik Kemenpora sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemenpora mendukung Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan mengidentifikasi data pemuda yang tergolong miskin ekstrem pada layanan data P3KE Kemenko PMK untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan sesuai dengan Program Prioritas Presiden; dan
2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Kemenpora melaksanakan Program Prioritas Aktual Presiden berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemenpora mendukung Penggunaan Produk dalam negeri melalui *apparel* yang digunakan dalam *event* keolahragaan nasional maupun internasional. Tema dan Target RB Tematik Kemenpora Tahun 2023-2024 tercantum dalam matriks reformasi birokrasi tematik sebagai berikut:

MATRIKS REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

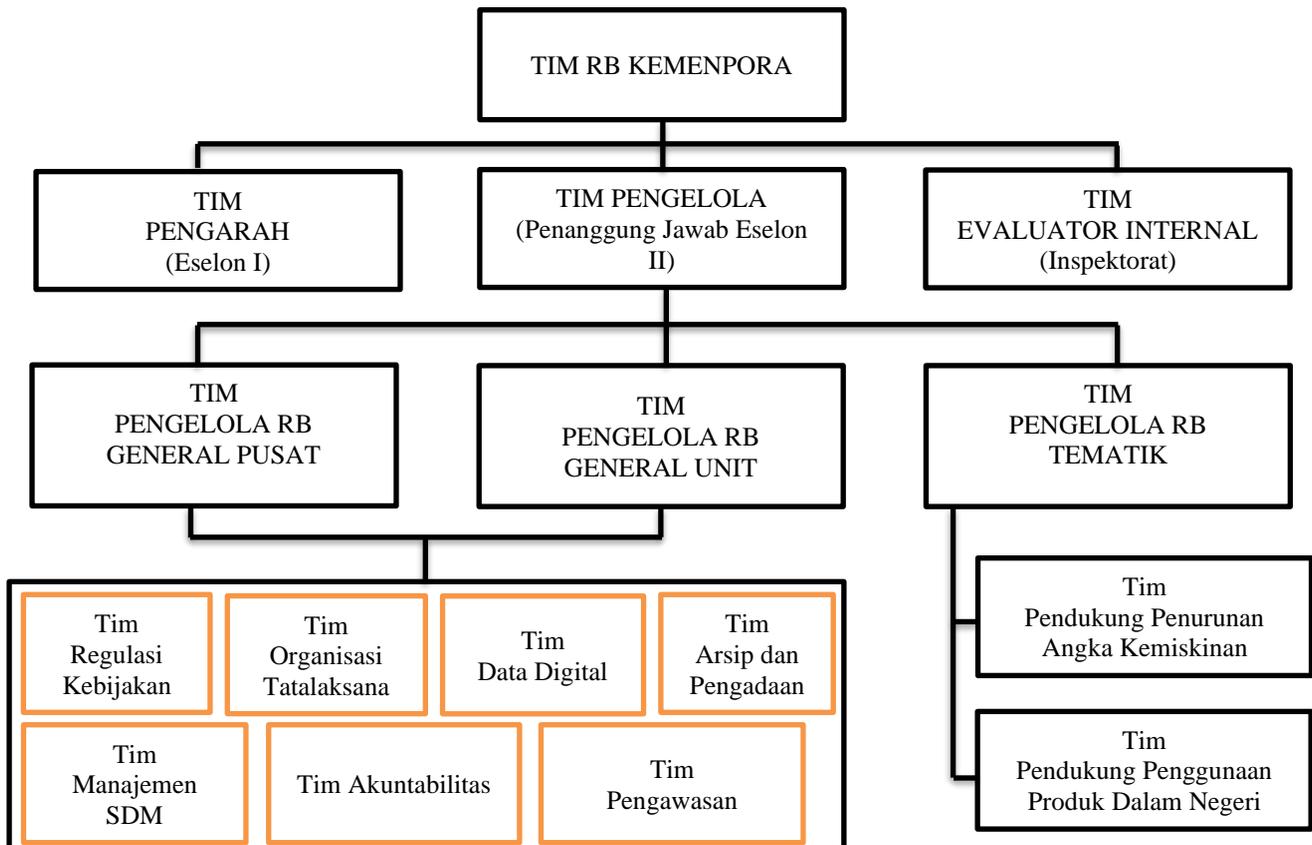
No	RB Tematik	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Kolaborasi/ Kerja sama bersama <i>stakeholders</i>
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana	
1	Penurunan Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya data pemuda miskin ekstrem.</li> <li>• Rendahnya minat pemuda dalam berwirausaha.</li> <li>• Rendahnya akses pemuda miskin ekstrem dalam kewirausahaan.</li> </ul>	Meningkatnya minat dan akses pemuda miskin ekstrem dalam berwirausaha.	Jumlah Pemuda Miskin Ekstrem dari data P3KE yang difasilitasi dalam berwirausaha	2%	3%	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Asdep Kewirausahaan Pemuda	Kemenko PMK
		Pelaksanaan program <i>Youth Edulife Skill</i> (YES) belum menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)	Meningkatnya kemampuan pemuda miskin ekstrem dalam berwirausaha.	Jumlah Pemuda Miskin Ekstrem dari data P3KE yang difasilitasi dalam program YES	15	20	Sekretaris Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Asdep Potensi Kemandirian Pemuda	Kemnaker
2	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada	Terwujudnya penggunaan produk dalam negeri pada	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam	50%	60%	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Asdep Olahraga Masyarakat	<i>Stakeholder</i> Internal: Biro Hukum dan Kerjasama, Biro

		penerima fasilitas olahraga masyarakat	penerima fasilitas bantuan	pembelanjaan fasilitas oleh pemerintah daerah /masyarakat					Keuangan dan Inspektorat.  <i>Stakeholder</i> Eksternal: Masyarakat dan Pemerintah Daerah
		Minimnya penggunaan produk dalam negeri pada event keolahragaan Nasional maupun Internasional	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada event keolahragaan Nasional maupun Internasional	Persentase pengadaan sarana dan prasarana untuk atlet, pelatih, panitia, dan peserta pada event keolahragaan.	45%	50%	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Unit Kerja pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	UKPBJ Kemenpora

BAB IV  
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Manajemen pelaksanaan RB Kemenpora ditunjukkan sebagai berikut:



Berdasarkan Manajemen Pelaksanaan RB di atas:

1. Tim Pengarah

Tim pengarah terdiri atas seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenpora, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan arahan agar pelaksanaan RB Kemenpora berjalan konsisten dan terarah sesuai *Road Map* RB Kemenpora 2020-2024;

2. Tim Pengelola

Penanggung jawab tim pengelola terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenpora yang mempunyai fungsi memonitoring pelaksanaan RB di lingkungan Kemenpora

a) Tim Pengelola RB General

Tim Pengelola RB General meliputi Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit. Tim Pengelola RB General Pusat dikelompokkan berdasarkan tim kerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan keterlibatan langsung dengan kegiatan utama terhadap pelaksanaan RB tahun 2023-2024 pada level mikro (*terlampir*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengelola RB General disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal serta kebutuhan percepatan pencapaian RB Mikro. Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja, Kemenpora mempunyai struktur organisasi Sekretariat Deputi sehingga pejabat pengawas pada setiap Eselon I akan dilaksanakan oleh Sekretaris Deputi dalam Tim Pengelola RB General Unit. Selanjutnya, Tim RB Unit Organisasi Eselon I diintegrasikan dengan Tim Pengelola RB General Pusat dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- 1) mulai tahun 2023 tidak dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tingkat unit organisasi Eselon I;
  - 2) evaluasi RB yang lebih berfokus pada hasil dibandingkan proses;
  - 3) penajaman pada Tim Pengelola RB Tematik;
  - 4) sebagian besar indikator kegiatan utama RB General telah tersinkronisasi dengan indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis Kemenpora dan unit kerja sehingga dapat diimplementasikan secara efektif; dan
  - 5) sedangkan untuk tingkat unit kerja, Tim Pengelola RB General merupakan Tim RB unit kerja dalam rangka membangun Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko (MR).
- b) Tim Pengelola RB Tematik
- Tim Pengelola RB Tematik ditunjuk berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan RB Tematik yang berfokus pada Penurunan Angka Kemiskinan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- 1) Tema Penurunan Angka Kemiskinan dilaksanakan oleh 2 (dua) kedeputian yaitu: Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asdep Potensi Kemandirian Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asdep Kewirausahaan Pemuda; dan
  - 2) Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dilaksanakan oleh 2 (dua) kedeputian yaitu: Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melalui Asdep Olahraga Masyarakat dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Asdep Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga.
- Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola Tim RB Tematik sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b, ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang urusan di bidang urusan perencanaan dan keuangan.
3. Tim Evaluator Internal
- Tim Evaluator Internal merupakan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan evaluasi RB internal Kemenpora.

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB dilakukan secara berkala. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik antara lain:

- a. Pelaksanaan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan RB General dan Tematik; dan
- b. Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB General dan Tematik.

BAB V  
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat RB termasuk ke dalam agenda prioritas Nasional, maka Kemenpora melakukan penajaman RB sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan Nasional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu:

1. Penajaman tujuan dan sasaran;
2. Penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak;
3. Fokus kepada isu hulu dan hilir; dan
4. Penajaman indikator RB.

Diharapkan, Kemenpora dapat mengimplementasikan dan menyukseskan RB sebagaimana *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO